Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (*Illegal Mining*)

Indra Setiawan, S.H., M.H., Ketua LBH Pelita Keadilan Bungo,

lbhpelitakeadilanbungo@gmail.com

Abstrak

Pertambangan Tanpa Izin atau PETI (*illegal mining*), masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menanggulangnya, meskipun regulasi hukum terkait penambangan telah diatur dan upaya pencegahan maupun penegakan hukum telah dilakukan, namun pertambangan tanpa izin masih marak terjadi. Hal ini disebabkan karena belum komprehensifnya upaya dalam membenahi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum penambangan ilegal. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin yang marak disejumlah daerah di Indonesia diduga akibat adanya pembiaran serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penambangan emas tanpa izin (*illegal mining*). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni permasalahan yang diangkat, dibahas, dan yang diuraikan fokus pada penerapan kaidah dan norma hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang artinya pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penanggulangan penambangan emas tanpa izin atau biasa dikenal dengan PETI adalah menggunakan sarana penal yakni penegakan hukum pidana dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Unsur pidana “setiap orang” dalam Pasal 158 UU Minerba tidak hanya diterapkan bagi pelaku utama penambangan ilegal tetapi juga bagi siapapun yang menyuruh melakukan, memberikan fasilitas, dan membantu pelaksanaan penambangan ilegal, dapat dikenakan pidana dengan penerapan Pasal 55 KUHP tentang turut serta. Sedangkan secara non penal yakni penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana dilakukan dalam bentuk penyederhanaan perizinan, pemberian regulasi perizinan dalam satu pintu, kegiatan pendidikan seperti penyuluhan hukum, patroli/pengawasan, membangun kesadaran melalui media massa, dan sinergisitas instansi pemerintah terkait dengan penegak hukum.

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, berbagai sumber daya alam terkandung diperut bumi Indonesia, seperti air, batubara, emas, minyak, nikel, gas bumi, pasir, dan lain-lain. Hak penguasaan Negara terhadap kekayaan alam ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Salah satu hasil kekayaan alam yang banyak dimanfaatkan manusia adalah logam mulia jenis emas, karena memiliki nilai komoditas dan nilai dagang yang relatif tinggi. Emas dan batubara merupakan golongan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena

memiliki dampak positif dalam pembiayaan pembangunan nasional, tetapi didalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sering menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat.

Alasan peningkatan kesejahteraan menjadi motivasi masyarakat melakukan aktivitas PETI baik secara tradisional maupun menggunakan alat berat seperti Ekskavator. Namun tanpa adanya wawasan lingkungan dan tanggungjawab pasca penambangan, aktivitas PETI telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti air sungai menjadi keruh¹, dan tercemar. Penambangan emas secara liar tidak hanya dipinggiran sungai tetapi telah merambah ke perkebunan masyarakat menggunakan alat berat sehingga menimbulkan galian penambangan berbentuk danau kecil yang berisi air berwarna kuning kecoklatan dengan kedalaman 3 sampai 4 meter, dan mengakibatkan lingkungan sekitarnya menjadi rusak².

Oleh karenanya Pertambangan Tanpa Izin atau PETI (*illegal mining*), masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menanggulangnya, meskipun regulasi hukum terkait penambangan telah diatur dan upaya pencegahan maupun penegakan hukum telah dilakukan, namun pertambangan tanpa izin masih marak terjadi. Hal ini disebabkan karena belum komprehensifnya upaya dalam membenahi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum penambangan ilegal³. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin yang marak disejumlah daerah di Indonesia diduga akibat adanya pembiaran serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang⁴.

Dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Ironisnya, PETI terus terjadi meskipun perbuatan tersebut secara tegas telah dilarang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Baru-baru ini Sabtu, 13 Mei 2023, ditemukan aktivitas PETI di Jorong Tombang, Nagari Sinurik, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Dilokasi penambangan, Tim Gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri menemukan mesin dompeng, alat-alat mesin, minyak solar, alat dulang emas manual dan emas hasil tambang⁵. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI Batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3)⁶

Demikian sulitnya pemberantasan terhadap tindak pidana PETI ini, khususnya terkait penambangan emas ilegal, menarik untuk dikaji lebih jauh khususnya berkenaan dengan

¹Ahmad Fahmi, *Penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin*, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol 15, 2 Mei 2019, Hlm.141

²Alvika Fatmawati Dwi Putri, Mujiono Hafidah Prasetyo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*, Jurnal Pembangunan Hukum Nasional, Vol.3, No.3, 2021, Hlm.314

³Prianter Jaya Hairi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*, Jurnal Info Singkat, Vol.XIII, No.15, Agustus 2021. Hlm.4

⁴Pakar: Tambang ilegal akibat minim pengawasan dan kendala perizinan - ANTARA News diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 22.00 wib

⁵Tambang Emas Ilegal Ditemukan di Pasaman Barat - Medcom.id diakses pada tanggal 15 Mei 2023, Pkl.13.37 wib

⁶<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pkl.08.17 wib

bagaimana penanggulangan terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar dapat secara efektif memberantas tindak pidana tersebut.

B. Pembahasan

Pengertian Tindak Pidana Penambangan Ilegal

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delik*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan⁷.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah: Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.⁸ Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”⁹. Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”¹⁰. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)¹¹.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum”¹². Lebih lanjut Moljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya;
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹³

⁷Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97.

⁹*Ibid.*

¹⁰Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 155.

¹¹Erdianto Effendi, *Op.,Cit.* hlm. 98.

¹²Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69.

¹³*Ibid.*

Selanjutnya Andi Hamzah, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menyebut “*Strafbaarfeit*” sebagai delik, memberikan definisi yakni: “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”¹⁴.

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.¹⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

Selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman pengertian tindak pidana pertambangan, maka perlu merujuk ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengenal adanya pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, selain itu juga terdapat bermacam macam tindak pidana pertambangan yakni diantaranya tindak pidana menyampaikan data laporan palsu, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak, tindak pidana sebagai pemegang IUP Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi, tindak pidana pencucian barang tambang, dan tindak pidana menghalangi kegiatan pertambangan.

Maka demikian dapat ditarik kesimpulan pengertian tindak pidana pertambangan adalah suatu perbuatan yang dilarang atau dilakukan tanpa izin dari pemerintah /Negara bagi seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan.

Penanggulangan Hukum Pidana: Penal – NonPenal

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut dengan politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁶

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72-88.

¹⁵Erdianto Effendi, *Op., Cit.* hlm.100.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm.2.

Menurut G.P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishmen*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)¹⁷

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels diatas, upaya-upaya tersebut dalam butir 2 dan 3 dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Sedangkan pendekatan butir 1 bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtpolitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendalian sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakan dengan sanksi yang ada dalam ketentuan pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁸

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan¹⁹

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Muladi bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu:

Bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Yang kedua usaha-usaha tanpa menggunakan penal (*prevention without punishment*) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas (*prevention without punishment*) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilan pidana dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu *primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention*.²⁰

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2011, hlm.45.

¹⁸Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.188.

¹⁹*Ibid.*, hlm.118.

²⁰Muladi, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1997, hlm.100.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni penal dan non penal

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Penal

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²¹

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalan (*deterrent effect*). Disamping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk melakukan kejahatan.²² Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.²³

Sehubungan dengan efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor-faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakikat dari sanksi itu sendiri
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi
- e. Peluang-peluang yang memang (seolah-olah) diberikan suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan²⁴

²¹Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.390.

²²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.225.

²³*Ibid*, hlm.229

²⁴Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.108.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Barda Nawawi Arif, terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang jelas
- b. Pada penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum²⁵

Oleh karena terjadinya kejahatan disebabkan oleh sebab yang sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga selalu dipersoalkan keefektifannya.²⁶

2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Upaya Non Penal

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁷ upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkansubutkan kejahatan.

Kebijakan non penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk memujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.²⁸

²⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hlm. 117-118.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. Hlm.46.

²⁷*Ibid*, hlm.72

²⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.159.

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.²⁹

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa upaya non penal adalah suatu upaya pencegahan tindak pidana / kejahatan dengan cara-cara diluar penerapan hukum pidana melainkan dengan cara edukatif kepada masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya-upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan moral, agama, sosial, pengawasan, maupun sosialisasi melalui media massa.

Menurut pendapat penulis, cara non penal lebih efektif dibandingkan upaya penal. Sebab upaya non penal lebih menyentuh pada akar permasalahan yang terjadi dengan penyelesaian yang humanis dan komunikatif secara masif dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat terhadap hukum, dibandingkan upaya penal yang mengatasi secara kasuistik dan menjadi beban biaya pemeliharaan terpidana.

W.A. Bonger berpendapat bahwa:

Dilihat dari efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat baik kembali, lebih baik disini juga lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.³⁰

Upaya Penal terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Sedangkan Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk memujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tercapainya cita-cita hukum yaitu kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya suatu usaha untuk memujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan

²⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, Op.Cit, hlm.48.

³⁰W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995, hlm.167.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada*, Jakarta, 2012, hlm.15.

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³²

Hukum pidana sebagai salah satu bentuk instrumen hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dimasyarakat, mengatasi dan meminimalisir kejahatan, memulihkan situasi dan kondisi aman dimasyarakat agar tujuan hukum untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Hukum pidana juga berfungsi sebagai sosial kontrol dimasyarakat terhadap bentuk-bentuk penyimpangan, kejahatan, dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang terjadi.

Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki peranan yaitu:

bahwa hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan³³

Parameter penambangan dikatakan ilegal atau tidak sah dikarenakan aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin adanya dari Pemerintah dan/atau penyalahgunaan izin sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan izin penambangan, dalam Pasal 1 UU Minerba terdapat 3 kategori jenis izin pertambangan yaitu:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Maka dalam hal ini, determinasi Pertambangan Emas Ilegal adalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dalam perspektif hukum pidana UU Minerba, aktivitas pertambangan emas yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah adalah suatu bentuk pelanggaran hukum pidana yang mengandung sanksi pidana.

Maraknya aktivitas PETI diberbagai daerah telah menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi lingkungan, masyarakat, dan Negara, seperti timbulkan konflik horisonal, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengurangan pendapatan negara. Penanggulangan terhadap aktifitas PETI ini, dapat ditempuh dengan sarana hukum penal yaitu dengan penerapan hukum pidana sebagai bentuk upaya represif/penindakan. Dalam Hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terdapat 2 jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan UU Minerba yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan³⁴. Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda
- c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi

³²*Ibid.*

³³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hlm.159.

³⁴Prianter Jaya Hairi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*, *Op.Cit.*

d. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUP Penjualan

Sedangkan sanksi pidana diatur di dalam BAB XXIII Pasal 158 s.d Pasal 165, yang merumuskan sebagai berikut:

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- (2) setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan

pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut, terdapat 7 jenis perbuatan pidana yaitu;

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK
2. Pemegang IUP, IPR, IPK, dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar
3. Melakukan eksplorasi tanpa IUP, IUPK
4. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan produksi
5. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK
6. Merintang kegiatan usaha
7. Penyalahgunaan wewenang untuk mengeluarkan IUP, IPR, IUPK

Bahwa diantara perbuatan pidana dibidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur didalam UU Minerba, ketentuan yang sesuai dengan penambangan emas tanpa izin adalah Pasal 158, yang merumuskan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Dari rumusan Pasal 158 tersebut, maka aktifitas PETI yang terjadi dapat ditanggulangi dengan menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) bagi pelaku penambangan emas ilegal. Unsur pidana “setiap orang” dalam Pasal 158 UU Minerba tidak hanya diterapkan bagi pelaku utama penambangan ilegal tetapi juga bagi siapapun yang menyuruh melakukan, memberikan fasilitas, dan membantu pelaksanaan penambangan ilegal, dapat dikenakan pidana dengan penerapan Pasal 55 KUHP tentang turut serta.

Penerapan sanksi pidana Pasal 158 UU Minerba bagi pelaku kejahatan penambangan emas ilegal adalah sebagai bentuk upaya pemerintah dalam pemberantasan aktifitas PETI. Sehingga penerapan sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penambang emas ilegal dan mampu mencegah masyarakat melakukan pelanggaran hukum pertambangan.

Akan tetapi jika melihat ketentuan pidana Pasal 158 UU Minerba, tidak mencantumkan batasan minimal pidana penjara maupun batasan minimal denda, akibatnya dalam penjatuhan sanksi hukum bersifat fleksibel tergantung penilaian pengadilan dalam melihat perbuatan dan dampak tindak pidana yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Namun fleksibilitas hukuman ini ini justru menjadi peluang bagi *stakeholder* yang terlibat untuk berupaya mendapatkansanksi hukum yang sering-ringannya. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam perkara pertambangan emas tanpa izin yakni³⁵:

1. Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN.Mrb, terdakwa terbukti melanggar pasal 161 UU Minerba dan divonis 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), (alat dompeng)
2. Perkara Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN.Mrb, terdakwa terbukti melanggar pasal 161 UU Minerba dan divonis 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Perkara Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN.Mrb, terdakwa terbukti melanggar pasal 161 UU Minerba dan divonis 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Perkara Nomor 105/Pid.Sus/2014/PN.Mrb terdakwa terbukti melanggar pasal 158 UU Minerba dan divonis 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
5. Perkara Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Mrb terdakwa terbukti melanggar pasal 158 UU Minerba dan divonis 1 (satu) tahun dan denda Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) (alat dompeng), alat dompeng.
6. Perkara Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Mrb terdakwa terbukti melanggar pasal 158 UU Minerba dan divonis 5 (lima) bulan dan denda Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), mesin dompeng.
7. Perkara Nomor 163/Pid.Sus/2013/PN.Mrb terdakwa terbukti melanggar pasal 158 UU Minerba dan divonis 4 (empat) bulan dan denda Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), mesin dompeng
8. Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2013/PN.Mrb terdakwa terbukti melanggar pasal 158 UU Minerba dan divonis 4 (empat) bulan dan denda Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), mesin dompeng
9. Perkara Nomor 195/Pid.Sus/2013/PN.Mrb terdakwa divonis 3 (tiga) bulan dan denda Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Sanksi hukum yang cenderung ringan ini tidak terlepas dari adanya paradigma bahwa penegakan hukum PETI bersifat relatif kompleks yang mengandung aspek sosio-ekonomis, dan tentu adanya penilaian dari penegak hukum terhadap peralatan, modal, dan besar kecil kerusakan yang ditimbulkan akibat PETI. Karena pada dasarnya kegiatan penambangan adalah hak rakyat setempat untuk melakukan pengelolaan pertambangan diwilayahnya sendiri untuk kesejahteraan

³⁵SIPP (pn-muarabungo.go.id) diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 17.00wib.

ekonomi masyarakat setempat sebagaimana tujuan pertambangan rakyat dalam Pasal 11 UU Minerba yang menyatakan “pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah”.

Disamping itu, tujuan pemidanaan menurut Gustav Radbruck sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan melalui penegakan hukumlah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicereit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)³⁶.

Tekait dengan berat ringan vonis pengadilan terhadap tindak pidana PETI, dalam kajian efektifitas penegakan hukum pidana, M. Daud Achmad, dkk, dalam jurnal Legalaitas Edisi Juni 2010 Volume 1 Nomor 2, menjelaskan bahwa dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh perusahaan menengah dan besar yang melakukan usaha pertambangan dan usaha pertambangan khusus dengan wilayah tambang yang sangat luas, tentu saja juga lebih besar dari pada perbuatan pidana perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pertambangan rakyat dengan wilayah tambang yang kecil. Oleh karenanya tidaklah tepat untuk menempatkan perbuatan pidana perusahaan pertambangan yang diusahakan rakyat tanpa izin dalam hal ini pertambangan emas tanpa izin (PETI) dalam posisi yang sama dengan perbuatan pidana oleh perusahaan besar atau korporasi yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin.

Penanggulangan PETI melalui sistem peradilan pidana juga terdapat kekurangan lainnya yakni tidak memberikan beban kewajiban hukum bagi pelaku penambangan/ terpidana untuk mereklamasi kerusakan penambangan yang telah terjadi. Sehingga pemulihan kerusakan lingkungan akibat PETI tidak diakomodir oleh hukum pidana itu sendiri. Tentu hal ini menjadi salah satu indikator penyebab tidak efektifnya penegakan hukum menggunakan sarana penal, disamping adanya faktor-faktor lainnya.

Meskipun penggunaan sarana penal dinilai belum cukup untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada karena tidak menyentuh pada akar penyebabnya, Namun setidaknya terlepas dari aspek berat ringan hukuman bagi pelaku kejahatan pertambangan, hal terpenting adalah kehadiran Negara dalam meminimalisir kerusakan akibat PETI seperti kerusakan lingkungan, penerimaan negara, konflik sosial, kesehatan maupun keselamatan pekerja, dapat dijalankan.

Upaya Non Penal terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal Emas

Sebagaimana dikatakan G.P Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan non penal yaitu pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishmen*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)

Kebijakan non penal (*non-penal policy*) adalah merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha

³⁶Sudikno Merto Kusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160

kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya

Berpijak pada pemikiran tersebut diatas, maka menurut pendapat penulis, upaya penanggulangan tindak pidana penambangan emas tanpa izin dengan metode non penal diantaranya yaitu:

1. Penyuluhan hukum, adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Dalam penyuluhan hukum ini, bertujuan untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat terkait penambangan emas, memberikan informasi tentang perizinan pertambangan, dampak lingkungan, cara-cara reklamasi lingkungan pasca penambangan, dan ancaman pidana pertambangan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

2. Monitoring / Pengawasan, adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan.

Pengawasan atau patroli perlu dilakukan aparat penegak hukum minimal 1 bulan 1 kali ditempat-tempat yang potensial terjadinya aktivitas penambangan, sehingga pelaku penambangan emas ilegal merasa tidak nyaman atas kehadiran petugas yang melakukan pengawasan. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini diperlukan peralatan yang memadai, karena dilokasi tambang emas terkadang didalam hutan, perkebunan, dan memiliki medan yang sulit, terjal, dan tanpa signal alat komunikasi, sehingga dalam hal ini diperlukan fasilitas yang mendukung termasuk anggaran yang cukup dari Negara.

3. Membangun kesadaran masyarakat melalui media massa, penyebaran informasi dan perubahan perilaku masyarakat melalui sarana media masa sangat signifikan dalam penanggulangan penambangan emas ilegal. Media masa baik cetak, elektornik, dan internet, sebagai sarana komunikasi massa memiliki peranan sebagai komunikator serta *agen of change* dalam lingkungna publik yang posisinya dapat mempengaruhi persepsi, perilaku, dan budaya masyarakat melalui pesan informasi, pendidikan, maupun pesan-pesan lainnya yang dapat dijangkau masyarakat luas, terlebih di era globalisasi ini semakin cepat penyebarluasan informasi melalui media sosial dilakukan. Dalam konteks penanggulangan penambang emas ilegal, media massa dapat dijadikan sarana penyebarluasan informasi prosedur dan mekanisme perizinan penambangan, dampak lingkungan akibat PETI, wawasan untuk reklamasi, sosialisasi, dan akses informasi peraturan pertambangan. Sehingga secara berkesinambungan akan membangun kesadaran dimasyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan yang terpenting menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.
4. Bekerjasama dengan instansi terkait. Bahwa salah satu problematika dalam pertambangan adalah tidak efisiensinya pengelolaan disektor pertambangan akibat tumpang tindih perizinan, pemegang izin yang tidak beroperasi, dan transparansi pengurusan izin pertambangan. Oleh karenanya diperlukan evaluasi dan perbaikan dengan membentuk

Satuan Tugas bersama antar instansi terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah Daerah dengan melibatkan pemerintah desa. Satgas ini diperlukan untuk melaksanakan fungsi koordinasi, evaluasi, monitoring, dan penindakan, aktifitas penambangan dari hulu hingga kehilir.

C. Penutup

Kesimpulan

Penanggulangan penambangan emas tanpa izin atau biasa dikenal dengan PETI adalah menggunakan sarana penal yakni penegakan hukum pidana dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Unsur pidana “setiap orang” dalam Pasal 158 UU Minerba tidak hanya diterapkan bagi pelaku utama penambangan ilegal tetapi juga bagi siapapun yang menyuruh melakukan, memberikan fasilitas, dan membantu pelaksanaan penambangan ilegal, dapat dikenakan pidana dengan penerapan Pasal 55 KUHP tentang turut serta.

Sedangkan secara non penal yakni penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana dilakukan dalam bentuk penyederhanaan perizinan, pemberian regulasi perizinan dalam satu pintu, kegiatan pendidikan seperti penyuluhan hukum, patroli/pengawasan, membangun kesadaran melalui media massa, dan sinergisitas instansi pemerintah terkait dengan penegak hukum.

Saran

Dari penelitian ini, Penulis hendak menyampaikan masukan kepada pemerintah dan penegak hukum dengan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar mengoptimalkan fungsi koordinasi secara hirarki yakni pemerintah pusat, daerah, kecamatan, dan pemerintah tingkat desa maupun koordinasi secara horizontal yakni pemerintah bersama penegak hukum, organisasi masyarakat, melakukan evaluasi, pengawasan, pendataan, dan penindakan terhadap pemegang ijin usaha apakah sesuai peruntukannya maupun kepada pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha pertambangan. Selanjutnya melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan bentuk lain dengan tujuan meningkatkan wawasan lingkungan bagi masyarakat.
2. Bagi penegak hukum, penegakan hukum terhadap kejahatan penambangan harus bersifat netral, tidak terlibat, tidak bersifat diskriminatif dalam penegakan hukum khususnya bagi perusahaan yang menggunakan modal yang menggunakan alat berat escavator dengan dampak lingkungan yang besar, harus ditegakan dan dijatuhkan sanksi lebih berat dari pelaku penambangan yang menggunakan modal kecil dengan alat sederhana. Bagi masyarakat, perlunya semangat menjaga lingkungan, meningkatkan wawasan dan pengetahuan dampak aktivitas PETI, dan mencegah PETI dengan melaporkan kepada pemerintah maupun kepada penegak hukum.

Daftar Pustaka

I. BUKU

- Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- _____, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Jakarta.
- _____, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Erdianto Effendi*, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1997, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Merto Kusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- W.A. Bongger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

III. JURNAL

- Ahmad Fahmi, *Penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin*, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol 15, 2 Mei 2019

Alvika Fatmawati Dwi Putri, Mujiono Hafidah Prasetyo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*, Jurnal Pembangunan Hukum Nasional, Vol.3, No.3, 2021.

Prianter Jaya Hairi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*, Jurnal Info Singkat, Vol.XIII, No.15, Agustus 2021.

IV. INTERNET

Pakar: Tambang ilegal akibat minim pengawasan dan kendala perizinan - ANTARA News diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 22.00 wib

Tambang Emas Ilegal Ditemukan di Pasaman Barat - Medcom.id diakses pada tanggal 15 Mei 2023, Pkl.13.37 wib

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pkl.08.17 wib

SIPP (pn-muarabungo.go.id) diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 17.00wib